

## Perkembangan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Sektor Industri di Provinsi Kalimantan Selatan

Danu Amparian <sup>1)\*</sup>, Saipudin <sup>2)</sup>, Ika Chandriyanti <sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

\*E-mail corresponding author: [danu.amparian@gmail.com](mailto:danu.amparian@gmail.com)

Received: 20-05-2021;  
Accepted: 19-11-2021;  
Available online: 29-04-2022

Ecoplan  
Vol. 5 No. 1, April 2022,  
hlm 1-19

ISSN p: 2620-6102  
e: 2615-5575

**Keywords:** *Industrial Sector, Labor Wages, Labor, Gross Regional Domestic Product, Path Analysis*

**Abstract** – *This research aimed to analyze the effect of industrial business units and labor wages (as an indicator of the industrial sector) on the labor absorption and Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the industrial sector in South Kalimantan Province. The research employed secondary data collected from time series to see the data developed during the period from 1998 to 2018. These data were then analyzed using the path analysis method. The results revealed that the industrial business units and labor costs have a significant effect on employment. Furthermore, the industrial business unit variables did not have a direct, significant influence on the GRDP of the industrial sector. A significant effect was also found between labor wages and labor absorption on the GRDP of the industrial sector. In an indirect manner, the labor absorption variable acts as an intermediary for the influence of the industrial business unit variable on the GRDP of the industrial sector. Meanwhile, in the effect of the labor wages on the GRDP of the industrial sector, the labor absorption variable does not act as an intermediary. Generally, labor wages have a greater effect on the GRDP of the industrial sector than the variables of industrial business units. Interestingly, a different conclusion was revealed by Nunung (2018) that the minimum wage in her research does not have a significant impact on employment in Central Java Province because there are companies that set wages below market prices. Furthermore, Rochmani et al. (2016) reported that the number of industrial business units does not positively impact labor absorption because industrial conditions in Central Java Province are labor-intensive. Therefore, labor absorption is not affected by the presence or absence of business units.*

**Abstrak** - Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Unit Usaha Industri dan Upah Buruh (sebagai indikator sektor industri) baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Sektor Industri Di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (*time series*) untuk melihat perkembangannya, selama periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2018. Data ini dianalisis menggunakan metode dalam penelitian ini yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel unit usaha industri dan upah buruh masing-masing berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya secara langsung variabel unit usaha industri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri sedangkan upah buruh dan penyerapan tenaga kerja masing-masing berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri. Kemudian secara tidak langsung variabel penyerapan tenaga kerja berperan sebagai perantara pengaruh variabel unit usaha industri terhadap PDRB sektor industri sedangkan pada pengaruh variabel upah buruh terhadap PDRB sektor industri, variabel penyerapan tenaga kerja tidak berperan sebagai perantara. Kemudian secara total variabel upah buruh lebih besar pengaruhnya terhadap PDRB sektor industri daripada variabel unit usaha industri. Penelitian dengan kesimpulan yang berbeda dihasilkan oleh Nunung (2018) dimana upah minimum tidak memberikan dampak yang signifikan dalam penyerapan

tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan terdapat perusahaan yang menetapkan upah dibawah harga pasar. Selanjutnya dalam penelitian Rochmani, et al. (2016) Jumlah unit usaha industri tidak memiliki dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja dikarenakan kondisi industri di Provinsi Jawa Tengah yang bersifat padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya keberadaan unit usaha.

**Kata Kunci :** Sektor Industri, Upah Buruh, Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Analisis Jalur (*Path Analysis*)

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan haruslah dilakukan bertahap di segala sektor maupun sub sektor ekonomi secara terencana dan terprogram untuk menuju ketinggian yang lebih baik (Mangilaleng et al., 2015). Peran sektor pertanian dan sektor industri dalam pembangunan selalu menjadi topik diskusi politik dan kebijakan pembangunan yang hangat di Indonesia, bahkan di negara berkembang manapun. Hal itu terutama dikaitkan dengan pemilihan langkah yang tepat, cepat dan efektif dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan, pengurangan kesenjangan dan pengentasan Kemiskinan (Priyarsono, 2011).

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi diberbagai negara sangat penting, karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan, selain itu sektor industri mempunyai peranan sebagai *leading sector* artinya sektor pemimpin (Arsyad, 2010). Sektor industri dapat memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai keunggulan dibandingkan sektor lain dengan nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Priyarsono, 2011). Sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-baku bagi suatu industri. Industri-industri tersebut juga memungkinkan berkembangnya sektor jasa, misalnya berdirinya sebuah lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan, yang kesemuanya itu akan mendukung pada lajunya pertumbuhan industri.

Pada struktur perekonomian, sektor pertambangan masih menjadi sektor yang berperan paling tinggi dalam perekonomian Kalimantan Selatan namun kontribusinya dari 26,93 persen pada tahun 2014 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi 20,61 persen pada tahun 2018. Di sisi lain, sektor Industri pengolahan cukup berperan bagi ekonomi Kalimantan Selatan. Pasalnya dari tahun ketahun cenderung mengalami kenaikan dan kontribusi sektor industri menjadi terbesar ke tiga dalam struktur ekonomi Kalimantan Selatan setelah pertambangan dan pertanian sebagai kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi dominan, masing-masing sebesar 20,61 persen; 14,39 persen; dan 14,00 persen dalam perekonomian Kalimantan Selatan yang tumbuh 5,13 persen ditahun 2018 (BPS Kalsel, 2019). Ditinjau dari aspek perekonomiannya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012-2015) perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Namun demikian setelah tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan kembali mengalami peningkatan sebesar 5,29 persen pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di Kalimantan Selatan setelah terjadi tren perlambatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan. Namun demikian kontribusinya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, didukung dengan laju pertumbuhannya yang menurun dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012-2015). Oleh karena itu, diperlukan peran sektor ekonomi lain dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada tahun 2017, kategori lapangan usaha industri memberikan sumbangan pertumbuhan yang paling dominan adalah sebesar 0,73 persen (BPS Kalsel, 2018). Sumbangan dominan tersebut dikarenakan kontribusi yang relatif terus meningkat terhadap total PDRB sekaligus kinerja laju pertumbuhan lapangan usaha industri sebesar 6,42 persen pada 2016, tertinggi sejak tahun 2012 sebesar 5,08 persen, meskipun sedikit melambat pada tahun 2017 sebesar 5,58.

Sebagian besar penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Meski demikian, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) struktur tenaga kerja pada bidang pertanian di Kalimantan Selatan terus mengalami tren penurunan. Terhitung sejak 2015, penurunan hampir mencapai 4 persen. Sebaliknya peningkatan serapan tenaga kerja terjadi pada beberapa kategori lain seperti industri, perdagangan dan jasa kemasyarakatan.

Kondisi diatas secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa sektor pertanian tidak lagi mampu berperan tinggi dalam upaya berkontribusi besar dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Diperlukan peran sektor ekonomi lain dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor ekonomi yang tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi sektor ekonomi yang juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir (*backward* dan *forward linkage*) sangat diperlukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tingkat nasional saat ini dan yang akan datang, sektor industri menjadi pilihan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi pasar tenaga kerja (Simanjuntak, 2011).

Berbagai penelitian tentang peran sektor industri dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan dengan berbagai hasil dan kesimpulannya. Nunung (2018) dalam penelitian empirisnya menghasilkan temuan bahwa jumlah perusahaan di sektor industri memiliki dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan investasi atau dengan pengembangan usaha yang telah ada sangat membantu dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Muhtamil (2017) juga menghasilkan temuan bahwa unit usaha serta nilai produksi memiliki dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Peningkatan jumlah unit usaha, perbaikan infrastruktur serta kemudahan birokrasi pelayanan diharapkan mampu mengurangi pengangguran di Provinsi Jambi melalui penyerapan tenaga kerja yang besar. Selanjutnya dalam penelitian Rochmani, et al. (2016) dalam penelitian empirisnya ditemukan bahwa upah minimum Kabupaten/Kota memiliki dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Industri yang bersifat padat karya serta berorientasi ekspor inilah diduga menjadi penyebab kenaikan upah minimum yang memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian dengan kesimpulan yang berbeda dihasilkan oleh Nunung (2018) dimana upah minimum tidak memberikan dampak yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan terdapat perusahaan yang menetapkan upah dibawah harga pasar. Selanjutnya dalam penelitian Rochmani, et al. (2016) Jumlah unit usaha industri tidak memiliki dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja dikarenakan kondisi industri di Provinsi Jawa Tengah yang bersifat padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya keberadaan unit usaha.

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di atas, kategori lapangan usaha sektor industri dalam beberapa tahun terakhir ada perkembangan kearah yang positif. Di sisi lain, dengan semakin bertumbuhnya sektor industri kedepan memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak lagi sebagai tanda kesiapan Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi bonus demografi. Selain itu beberapa penelitian mengenai peran sektor industri dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan oleh para peneliti termasuk adanya GAP perbedaan hasil penelitian, hal tersebut menjadikan salah satu alasan peneliti melakukan penelitian kembali dengan tahun berbeda dan juga dengan wilayah yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah unit usaha industri dan upah buruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja, unit usaha industri dan upah buruh terhadap PDRB Sektor Industri. Serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara tidak langsung unit usaha industri dan upah buruh terhadap PDRB Sektor Industri melalui Penyerapan Tenaga Kerja.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sektor Industri**

Industri merupakan kegiatan ekonomi dari sekumpulan perusahaan industri yang melakukan kegiatan produksi bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses pengolahan dalam jumlah yang besar sehingga memiliki nilai tambah untuk memperoleh keuntungan, dimana hasil dari kegiatan dalam industri tersebut tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa (Kuncoro, 2007).

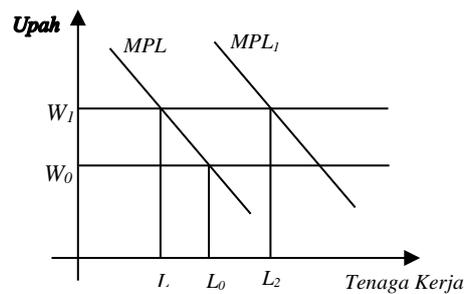
### **Teori Pasar Tenaga Kerja**

Dalam hubungan industrial, tenaga kerja yang berkualitas serta kondisi kerja yang baik sangat diperlukan produsen untuk mencapai hasil produksi yang berkualitas, disamping itu persoalan upah yang layak bagi tenaga kerja juga selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja (Aryanti et al., 2015; Sholeh, 2007). Kondisi produsen yang membutuhkan tenaga kerja untuk proses produksi serta pencari kerja yang membutuhkan kesempatan kerja dipertemukan dalam aktivitas permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja (Aryanti et al., 2015).

### **Teori Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan dalam kaitannya dengan tenaga kerja diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dikehendaki seorang pengusaha untuk dipekerjakan pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Sholeh, 2007). Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja disebut sebagai *derived demand* atau permintaan turunan (Simanjuntak 2001 dalam Pramusinto et al., 2019; Atmanti & Basuki, 2011). Di sisi lain dengan semakin banyak tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka semakin banyak pula output yang diproduksi dikarenakan output barang dan jasa suatu perekonomian bergantung pada faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Kondisi tersebut diartikan sebagai produk marginal tenaga kerja (*Marginal Product of Labor*, MPL) yang merupakan jumlah *output* tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan dengan asumsi mempertahankan jumlah modal tetap (Mankiw, 2003).

Untuk melihat lebih jelas gambaran kurva permintaan tenaga kerja, kita dapat melihat hubungannya pada Gambar 1 sebagai berikut (Borjas, 2016 dalam Pramusinto, et al., 2019):



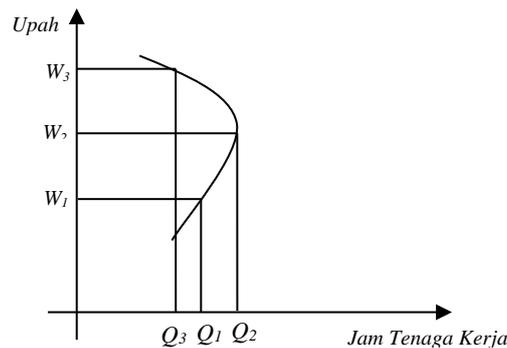
**Gambar 1. Kurva Permintaan Tenaga Kerja**

Gambar di atas menunjukkan ketinggian kurva permintaan tenaga kerja tergantung pada harga output dan produk marginal. Jika tingkat upah turun, perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, sehingga permintaan akan tenaga kerja bergeser ke kanan. Namun jika perusahaan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, hal ini mengarahkan pada peningkatan *output* sehingga harga akan menurun karena kelebihan penawaran, artinya nilai marginal produk (*MPL*) menurun yang mengakibatkan kurva permintaan untuk tenaga kerja menurun ke bawah. Di sisi lain kenaikan harga output akan menggeser nilai kurva produk marginal (*MPL*) ke atas dan akan meningkatkan lapangan pekerjaan kembali (Borjas, 2016 dalam Pramusinto, et al., 2019).

### **Teori Penawaran Tenaga Kerja**

Penawaran tenaga kerja merupakan penyediaan sumberdaya manusia atau tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu (Sholeh, 2007) yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen maupun pencari kerja (Aryanti et. al, 2015, p. 30). Dalam teori klasik, sumberdaya manusia (pekerja) diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak pada tingkat upah berlaku (Boediono, 2011), bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya (Sholeh, 2007). Penawaran tenaga kerja sangat ditentukan oleh banyaknya penduduk di usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Semakin banyak angkatan kerja maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat (Santoso, 2012 dalam Pramusinto, et al., 2019).

Untuk melihat lebih jelas gambaran kurva penawaran tenaga kerja, kita dapat melihat hubungannya pada Gambar 2 sebagai berikut (Sholeh, 2007):



**Gambar 2. Kurva Penawaran Tenaga Kerja**

Pada gambar 2.2 menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan hubungan antara jumlah jam kerja dari pekerja dengan berbagai tingkat upah. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari  $W_1$  ke  $W_2$ ). Setelah kembali mencapai tambahan upah tertentu ( $W_3$ ), pertambahan upah justru mengurangi waktu (dari  $Q_2$  ke  $Q_3$ ) yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (Sholeh, 2007). Keadaan seperti ini menandakan bahwa kesejahteraan sudah membaik atau mempunyai suatu keahlian yang lebih dan jumlah jam kerja yang ditawarkan juga semakin berkurang pada saat upah meningkat yang mengakibatkan *slope* kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif, sehingga kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang atau disebut dengan *backward-bending labor supply curve* (Borjas, 2016 dalam Pramusinto, et al., 2019).

### Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan pada suatu sektor ekonomi. Permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan, sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Sukirno, 2009).

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan keadaan sosial dan ekonomi suatu negara termasuk juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Pramusinto et. al, 2019). Oleh sebab itu, mengetahui faktor penentu penyerapan tenaga kerja dengan melihat temuan hasil empiris penelitian terdahulu yang relevan beserta teori yang mendasarinya adalah penting. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja beserta penjelasannya antara lain adalah sebagai berikut:

#### Unit Usaha Industri

Jumlah unit usaha atau perusahaan industri sering dijadikan sebagai pertimbangan sebuah penentuan kebijakan karena efek dari perubahan ini sangatlah nyata dan luas terhadap serapan tenaga kerja. Dalam jangka panjang berkurangnya jumlah perusahaan yang disebabkan karena pemberlakuan tingkat upah minimum yang tidak bisa ditanggung oleh beberapa perusahaan, akan menyebabkan terjadinya pengurangan permintaan tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan (Sholeh, 2007).

Disisi lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Squire (1992) dalam Muhtamil (2017) dimana jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula. Pernyataan tersebut sejalan dengan Karib (2012) dalam Rochmani et. al., (2016) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu industri. Kondisi tersebut didukung dengan hasil temuan dari Nunung (2018); Muhtamil (2017); Zenda & Suparno (2017); Bustam (2016); dan Basuki & Arwanis (2015) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di daerah penelitian masing-masing.

#### Upah Buruh

Salah satu faktor penyebab dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia adalah adanya kenaikan upah (Majalah Nakertrans, 2004 dalam Sholeh, 2007). Bagi perusahaan kenaikan upah merupakan beban biaya produksi sebagai balas jasa kepada pekerja selama proses produksi (Atmani & Basuki, 2011). Di sisi

lain bagi pekerja kenaikan upah diperlukan untuk memenuhi pendapatan yang layak untuk hidupnya (Sholeh, 2007). Upah itu sendiri dalam teori ekonomi, dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja (Sukirno, 2009).

Kebijakan upah minimum dijadikan aturan pengupahan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara tenaga kerja dan perusahaan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah berfungsi sebagai jaring pengaman agar tingkat upah tidak berada pada titik terendah, sehingga meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah (Nurtiyas, 2016).

Kondisi diatas senada dengan Sumarsono (2009) yang menyatakan bahwa perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka pengusaha dalam hal ini lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

Teori diatas sejalan dengan hasil temuan dari studi Dwirainaningsih (2018); Sulistiawati (2012); serta Dimas & Woyanti (2009) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian masing-masing. Artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja yang produktifitasnya rendah.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dengan melihat angka PDRB pada suatu daerah memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai (Maharani, 2016). Jadi nilai PDRB ini merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah apakah menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya (Hapsari et. al., 2014). Oleh sebab itu, mengetahui faktor penentu PDRB dengan melihat temuan hasil empiris penelitian terdahulu yang relevan beserta teori yang mendasarinya adalah penting. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi PDRB beserta penjelasannya antara lain adalah sebagai berikut:

#### **Serapan Tenaga Kerja**

Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti mengolah tanah dan memanfaatkan modal, sehingga salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu menghasilkan PDRB yang lebih besar melalui peningkatan serapan tenaga kerja dapat tercapai (Maharani, 2016). Perubahan tenaga kerja ini merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai PDRB dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah (Rahman et. al., 2016). Di sisi lain tenaga kerja itu sendiri merupakan penduduk pada usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa (Suparmoko, 2002 dalam Maharani, 2016).

Dalam model pertumbuhan Solow, dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi yang berupa penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal (investasi). Model pertumbuhan Solow ini yang sering disebut sebagai model pertumbuhan neoklasik, dengan model dasarnya adalah sebagai berikut (Mankiw, 2003 dalam Nizar et. al., 2013):

$$Y = f(K,L)$$

Dimana:

Y = Output

K = Kapital/modal fisik

L = Tenaga Kerja

Menurut teori pertumbuhan neoklasik, kenaikan kuantitas tenaga kerja berupa pertumbuhan penduduk serta kualitas tenaga kerja berupa perbaikan pendidikan merupakan salah satu sumber pertumbuhan output (Nizar et. al., 2013). Hal ini sesuai dengan hasil temuan dari Maharani (2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan PDRB di Sumatera Utara. Artinya apabila terjadi kenaikan serapan tenaga kerja, maka kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan nilai pertumbuhan output Sumatera Utara.

#### **Unit Usaha Industri**

Usaha industri merupakan penyedia utama lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi (PDB) dipengaruhi oleh banyak faktor (Audretsch et. al., 2002 dalam Raselawati, 2011). Peningkatan jumlah perusahaan atau unit industri ini akan

meningkatkan jumlah output, seiring dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh tambahan jumlah perusahaan tersebut (Matz, 2003). Teori ini didukung dengan hasil temuan dari Raselawati (2011) yang menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha kecil menengah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha kecil menengah di Indonesia.

### **Upah Buruh**

Kenaikan tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya (Sumarsono, 2009).

Disisi lain penetapan besarnya upah minimum yang baru, juga mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Dalam teori upah efisiensi, disebutkan bahwa dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk memberi nutrisi yang baik kepada keluarganya, sehingga akan memberi dampak yang besar pula dalam peningkatan produktivitasnya. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh di atas upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat dan jumlah output yang diproduksi akan meningkat pula (Nurtiyas, 2016). Kondisi ini sesuai dengan hasil temuan dari Utami (2013) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di kawasan Kedungsepur.

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak penelitian yang dikembangkan dalam kasus penyerapan tenaga kerja pada sektor industri yang lebih berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja maupun pengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, antara lain Nunung (2018) yang menggunakan indikator jumlah perusahaan, angkatan kerja, UMR serta PDRB untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kab/kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya faktor jumlah perusahaan dan angkatan kerja yang berpengaruh signifikan sedangkan upah minimum ternyata tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian penelitian Basuki dan Awanis (2015) yang menggunakan indikator unit usaha, investasi, nilai produksi serta upah untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil kab/kota di Provinsi Yogyakarta dengan hasil penelitian yang menunjukkan hanya faktor investasi, nilai produksi yang berpengaruh signifikan ditambah dengan unit usaha yang memiliki pengaruh yang paling signifikan namun berbeda dengan temuan upah minimum yang ternyata tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kemudian pengembangan penelitian pengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja seperti Muhtamil (2017) dengan menggunakan indikator unit usaha, investasi serta nilai produksi sektor industri untuk melihat pengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dengan temuan bahwa unit usaha juga berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Zenda & Suparno (2017) dengan temuan jumlah industri yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya, serta temuan Bustam (2016) dengan unit UMKM yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sedikit berbeda dengan temuan Rochmani, et al. (2016) dimana unit usaha industri ternyata tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja namun upah minimum tetap berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Putra (2012) dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa upah juga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Penggunaan metode dengan pendekatan analisis jalur (*path analysis*) beberapa kali digunakan dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung hubungan antar variabelnya. Penelitian sebelumnya mengenai penyerapan tenaga kerja yang menggunakan analisis jalur antara lain Sulistiawati (2012) yang menggunakan indikator upah minimum untuk menganalisa penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat pada 33 provinsi di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut metode analisis jalur berhasil membuktikan bahwa upah berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu Ishak (2013) menerapkan metode analisis jalur (*path analysis*) untuk melihat hubungan variabel-variabel terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis perkembangan indikator sektor industri di Kalimantan Selatan yang diduga mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Sektor Industri Kalimantan Selatan. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi yaitu Unit Usaha Industri dan Upah Buruh. Adapun ruang lingkup sektor industri dalam penelitian ini adalah masuk dalam klasifikasi sektor industri manufaktur (pengolahan), dengan periode yang dipilih untuk observasi dalam penelitian ini adalah tahunan yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 yaitu selama rentang waktu 21 (dua puluh satu) tahun.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yang dilakukan dengan cara statistik yakni menganalisa dengan berbagai dasar statistik dengan cara membaca tabel, grafik atau angka yang telah tersedia kemudian dilakukan beberapa uraian atau penafsiran dari data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan studi penjelasan (*explanatory research*) dimana penelitian keilmuan diarahkan untuk menggali atau mengembangkan bagian dari ilmu tertentu dengan menjelaskan suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan sifat eksplanasi ilmu, digolongkan pada jenis penelitian kausalitas yaitu penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (*cause-effect*) antar beberapa konsep atau beberapa variabel yang dikembangkan dan diarahkan untuk menggambarkan adanya sebab akibat antara beberapa situasi yang digambarkan dalam variabel, dan atas dasar itu ditariklah sebuah kesimpulan umum (Ferdinand, 2014).

### **Tempat/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tempat penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain di pulau Kalimantan sebesar 73,41 persen, sedangkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan peningkatan yang paling signifikan pada tahun 2018 dibandingkan provinsi lain di pulau Kalimantan, dimana TPT itu sendiri merupakan indikator yang menunjukkan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.

### **Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perkembangan Unit Usaha Industri dan Upah Buruh di sektor industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto pada sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari salah pengertian antara penulis dengan pembaca maka berikut ini akan penulis definisikan variabel penelitian serta metode pengukurannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu:

#### ***Variabel Endogenous (variabel terikat)***

Variabel *Endogenous* merupakan variabel yang memiliki penyebab eksplisitnya atau dengan kata lain variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut, yang mencakup semua variabel perantara dan terikat dalam suatu model diagram jalur (Sunyoto, 2012). Variabel *endogenous* dalam penelitian ini adalah variabel Penyerapan Tenaga kerja (Z) dan variabel PDRB Sektor Industri (Y).

#### ***Variabel Exogenous (variabel bebas)***

Variabel *Exogenous* merupakan variabel yang tidak memiliki penyebab eksplisitnya atau dengan kata lain variabel yang tidak mempunyai anak panah yang menuju ke arah variabel tersebut, dan ditunjukkan anak panah dengan kepala dua jika antara variabel *exogenous* dikorelasikan (Sunyoto, 2012). Variabel *exogenous* dalam penelitian ini adalah variabel Unit Usaha Industri (X1) dan variabel Upah Buruh (X2).

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti yang digunakan untuk memahami lebih mendalam tentang variabel pada penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

#### ***Penyerapan Tenaga Kerja (Z)***

Penyerapan Tenaga Kerja adalah variabel dalam penelitian ini yang didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang bekerja atau dipekerjakan oleh perusahaan dalam memproduksi barang pada sektor industri pengolahan yang diukur dalam satuan jiwa.

### Produk Domestik Regional Bruto (Y)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah variabel dalam penelitian ini yang didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu pada sektor industri manufaktur atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang diukur dalam satuan miliar rupiah.

### Unit Usaha Industri (X1)

Unit Usaha Industri adalah variabel dalam penelitian ini yang didefinisikan sebagai jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang termasuk dalam keseluruhan kelompok industri manufaktur yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel unit usaha industri tersebut diukur dalam satuan buah.

### Upah Buruh (X2)

Upah Buruh adalah variabel dalam penelitian ini yang didefinisikan sebagai pembayaran dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh berupa data upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan yang diukur dalam satuan rupiah.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dari berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan menurut cara pengumpulannya termasuk data *time series* yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangannya, dimana dalam penelitian ini selama periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2018.

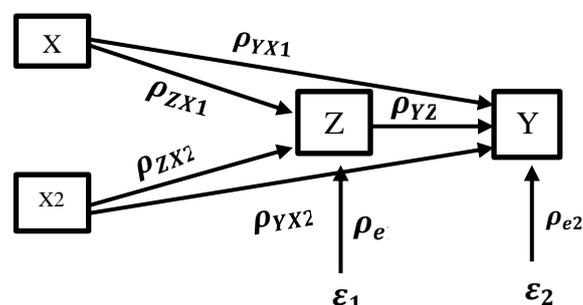
### Teknik Analisis Data

#### Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur (*path analysis*) merupakan pengembangan bentuk regresi berganda yang menggunakan variabel yang dapat langsung diobservasi (*observed variable*) tanpa menggunakan variabel laten (Ferdinand, 2014) dengan tujuan untuk menganalisis pola hubungan kausal (sebab-akibat) antar variabel serta untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen baik secara serempak maupun secara sendiri-sendiri dalam suatu model (Basuki & Prawoto, 2017). Solusi yang diperlukan jika suatu variabel tidak hanya memprediksi variabel lain secara langsung tetapi juga secara tidak langsung adalah dengan regresi yang melibatkan variabel mediator atau perantara (Sunyoto, 2012). Oleh sebab itu, pengujian analisis jalur dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software SPSS* versi 20 dengan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut (Noor, 2014):

#### Mengkonstruksi Diagram Jalur

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah menerjemahkan hipotesis penelitian ke dalam bentuk diagram jalur (*path diagram*) dan bentuknya ditentukan oleh proporsisi teoritik yang berasal dari kerangka konseptual penelitian (Noor, 2014), yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1. Diagram Jalur Penelitian

#### Konversi Diagram Jalur Menjadi Persamaan Struktural

Persamaan struktural merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur yang ada (Noor, 2014), dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kejadian sebab akibat yang akhirnya menyebabkan 1 (satu) kejadian yaitu pada Y, yang terbagi ke dalam 2 (dua) persamaan substruktural adalah sebagai berikut:

**Persamaan 1:** Hubungan sebab akibat dari X1 dan X2 ke Z

$$Z = \rho_{ZX1}X1 + \rho_{ZX2}X2 + \epsilon_1$$

Persamaan di atas menyatakan pengaruh langsung dari variabel eksogen (X1 dan X2) terhadap variabel endogen (Z) dengan galat  $\varepsilon_1$ .

**Persamaan 2:** Hubungan sebab akibat dari X1, X2 dan Z ke Y

$$Y = \rho_{YX1}X1 + \rho_{YX2}X2 + \rho_{YZ}Z + \varepsilon_2$$

Persamaan di atas menyatakan pengaruh langsung dari variabel eksogen (X1 dan X2) dan variable perantara (Z) terhadap variabel endogen (Y) dengan galat  $\varepsilon_2$ .

#### **Metode Pendugaan Parameter (Estimasi)**

Pendugaan parameter dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi nilai koefisien jalur (*path coefficient*) untuk melihat pengaruh antar variabel dan nilai *p-value* untuk melihat tingkat signifikansi antar variabel baik hubungan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel perantara.

Pengukuran nilai koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai *p-value* untuk hubungan secara langsung dapat dilihat dari hasil *output software SPSS* versi 20, sedangkan untuk pengukuran nilai koefisien jalur (*path coefficient*) untuk hubungan secara tidak langsung dilakukan secara manual dengan perkalian 2 (dua) koefisien jalur (*path coefficient*) yang berada pada jalur hubungan tidak langsung (Noor, 2014, p. 107).

Kemudian untuk menentukan signifikansi pengaruh secara tidak langsung dilakukan penilaian dengan membandingkan 2 (dua) koefisien jalur (*path coefficient*) langsung dan tidak langsung dengan ketentuan jika koefisien jalur langsung lebih kecil dari koefisien jalur tidak langsung maka tingkat signifikansi pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) adalah signifikan begitu pula sebaliknya (Sunyoto, 2012, p. 11).

#### **Evaluasi Model Struktural**

Evaluasi model struktural dapat diukur dari koefisien determinasi total ( $R^2$ -total) dengan perhitungan nilai koefisien determinasi total ( $R^2$ ) dilakukan secara manual dengan rumus sebagai berikut (Haryono, 2017):

$$R^2\text{-total} = 1 - (Pe_1^2) (Pe_2^2) \dots (Pe_p^2)$$

Dimana  $Pe_1^2$  dan  $Pe_2^2$  adalah nilai koefisien jalur variabel diluar model, sedangkan perhitungan nilai  $Pe_1^2$  dan  $Pe_2^2$  dilakukan secara manual dengan rumus sebagai berikut (Haryono, 2017):

$$Pe_i = \sqrt{1 - R_i^2}$$

Dimana  $R_i^2$  merupakan koefisien determinasi (*R-Square*) variabel endogen berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan *software SPSS* versi 20.

#### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan penilaian sebagai berikut:

##### **Koefisien Jalur (Path Coefficient)**

Pengujian koefisien jalur (*path coefficient*) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

##### **Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Pengujian t-Statistik digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel eksogen (*exogenous*) secara parsial terhadap variabel endogen (*endogenous*) dengan prosedur sebagai berikut (Noor, 2014):

- a. Menentukan hipotesis masing-masing kelompok:  $H_0$  = Variabel eksogen secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel endogen.  $H_1$  = Variabel eksogen secara parsial atau individu memiliki pengaruh terhadap variabel endogen.
- b. Dalam penelitian ini untuk pengaruh secara langsung (*direct effect*) dilakukan dengan melihat nilai *p-value* dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan kriteria pengujian:
  - 1) Apabila *p-value* > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel eksogen dengan variabel endogen.
  - 2) Apabila *p-value* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel eksogen dengan variabel endogen.
- c. Dalam penelitian ini untuk pengaruh secara tidak langsung (*indirect effect*) dilakukan dengan membandingkan koefisien jalur langsung dan tidak langsung dengan kriteria pengujian (Sunyoto, 2012):
  - 1) Apabila koefisien jalur langsung > koefisien jalur tidak langsung maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel eksogen dengan variabel endogen.
  - 2) Apabila koefisien jalur langsung < koefisien jalur tidak langsung  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel eksogen dengan variabel endogen.

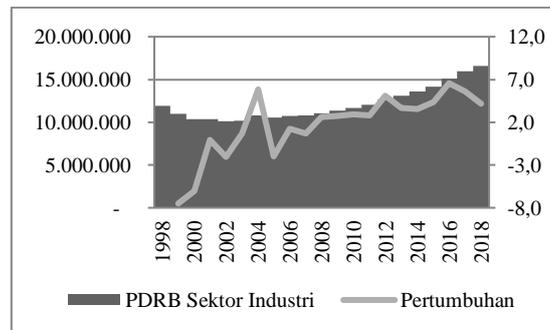
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penjelasan Umum Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan gambaran singkat perkembangan beberapa indikator ekonomi yang berkaitan dengan sektor industri di Kalimantan Selatan sebagai variabel penelitian, adalah sebagai berikut:

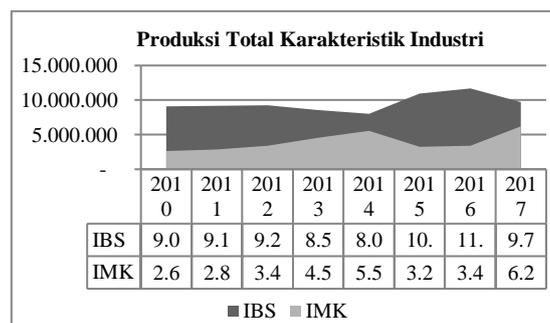
#### *Perkembangan PDRB Sektor Industri di Kalimantan Selatan*

Serupa dengan pola tahun-tahun sebelumnya, di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 penopang utama kinerja ekonomi yang diukur dengan nilai PDRB ini paling besar disumbang oleh Pertambangan dan Penggalan (20,61 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,39 persen), serta kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 16.598.109 juta rupiah atau sebesar 14,00 persen dari total PDRB Provinsi Kalimantan Selatan.



**Gambar 5.1. Perkembangan PDRB Sektor Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1998-2018**

Pada Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 1998-2018 cenderung meningkat. Selama tahun pengamatan, total produksi yang dihasilkan sektor industri Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata mencapai 12.098.728 juta rupiah, dengan total produksi paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 16.598.109 juta rupiah dan paling rendah pada tahun 2002 sebesar 10.126.852 juta rupiah. Kondisi ini terjadi karena pemulihan akibat dari adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pertengahan tahun 1997.

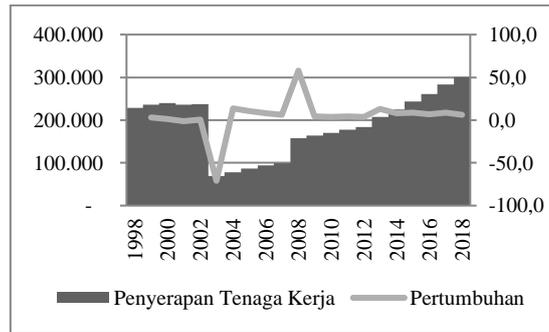


**Gambar 5.2. Produksi Total Karakteristik Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017**

Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Kalimantan Selatan. Selama beberapa tahun masa pemulihan akibat dari terjadinya krisis moneter tahun 1997, total produksi sektor industri relatif rendah hanya berkisar antara 10.126.852 juta rupiah hingga 11.908.635 juta rupiah. Namun setelah melewati masa transisi tersebut, sektor industri mulai ada tanda perbaikan dan mampu berproduksi dengan total produksi rata-rata 12.520.847 juta rupiah.

#### *Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kalimantan Selatan*

Penyerapan tenaga kerja sektor industri cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tenaga kerja di sektor industri sebanyak 300.404 jiwa atau sebesar 8,16 persen dari total keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

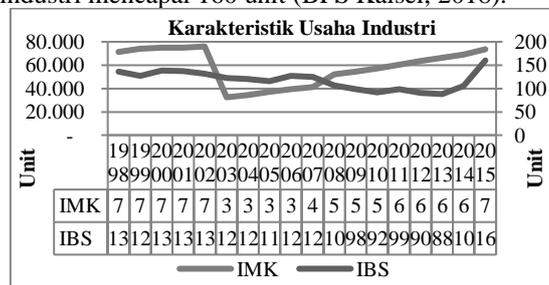


**Gambar 5.3. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1998-2018**

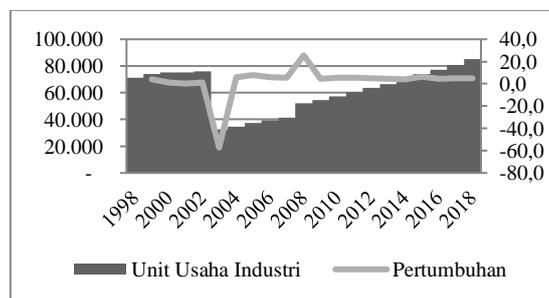
Berdasarkan Gambar 5.3 diperoleh informasi bahwa perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi Kalimantan Selatan terus berubah dan fluktuatif pada periode 1998-2018 dengan tren yang menaik. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 36,7 persen atau sebanyak 156.995 jiwa dari 99.452 jiwa pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2003 terjadi pertumbuhan negatif sebesar -245 persen atau sebanyak 68.916 jiwa dari 237.738 jiwa pada tahun 2002.

**Perkembangan Unit Usaha Sektor Industri di Kalimantan Selatan**

Berdasarkan data dari Survei Industri Manufaktur Menengah Besar Tahunan, telah terjadi penambahan unit usaha industri sebanyak 55 unit pada kelompok industri menengah besar pada tahun 2015, dengan jumlah unit usaha industri mencapai 160 unit (BPS Kalsel, 2018).



**Gambar 5.4. Karakteristik Usaha Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1998-2015**



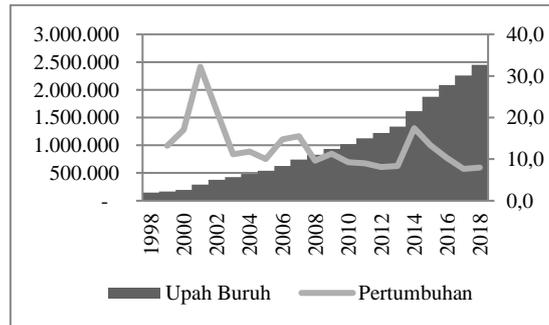
**Gambar 5.5 Perkembangan Unit Usaha di Sektor Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1998-2018**

Berdasarkan Gambar 5.5 diperoleh informasi bahwa perkembangan unit usaha industri Provinsi Kalimantan Selatan terus berubah dan fluktuatif pada periode 1998-2018 dengan tren yang menaik. Pertumbuhan unit usaha industri tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 20,4 persen atau sebanyak 52.156 buah dari 41.521 buah pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2003 terjadi pertumbuhan negatif sebesar -133,8 persen atau sebesar 32.579 buah dari 76.159 buah pada tahun 2002.

**Perkembangan Upah Buruh Sektor Industri di Kalimantan Selatan**

Perkembangan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan nilai UMP setiap tahun ini belum dapat diartikan

sebagai kenaikan pada kesejahteraan pekerja apabila kenaikan UMP belum diimbangi dengan kenaikan penghasilan untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

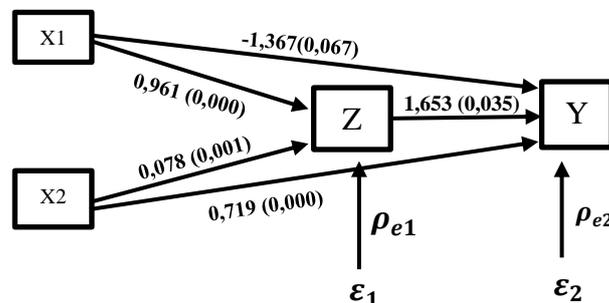


**Gambar 5.6 Perkembangan Upah Buruh di Sektor Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1998-2018**

Berdasarkan Gambar 5.6 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 1998-2018 nilai UMP Kalimantan Selatan meningkat dengan rata-rata laju peningkatan sebesar 13,01 persen per tahun. Selama tahun 1998-2018 kenaikan UMP Kalimantan Selatan paling signifikan terjadi pada tahun 2001 yaitu naik sebesar Rp. 95.000 atau mencapai 32,2 persen menjadi Rp. 295.000 dari Rp. 200.000 pada tahun 2000.

**ANALISIS DATA**

**Mengkonstruksi Diagram Jalur**



**Gambar 5.7. Diagram Jalur**  
*Sumber: diolah (output SPSS versi 20)*

**Mengkonversi Keperamaan Struktural**

Berdasarkan model diagram jalur pada Gambar 5.7 di atas maka dapat dirumuskan persamaan struktural yang terbagi ke dalam 2 (dua) persamaan substruktural, adalah sebagai berikut:

Persamaan 1: Hubungan sebab akibat dari X1 dan X2 ke Z

$$Z = 0,961X1 + 0,078X2 \tag{1}$$

Persamaan di atas menyatakan pengaruh langsung dari variabel eksogen (X1 dan X2) terhadap variabel endogen (Z). Dimana terjadi pengaruh langsung X1 terhadap Z sebesar 0,961 dan pengaruh langsung X2 terhadap Z sebesar 0,078.

Persamaan 2: Hubungan sebab akibat dari X1, X2 dan Z ke Y

$$Y = -1,367X1 + 0,719X2 + 1,653Z \tag{2}$$

Persamaan di atas menyatakan pengaruh langsung dari variabel eksogen (X1 dan X2) dan variabel perantara (Z) terhadap variabel endogen (Y). Dimana terjadi pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 1,367 dan pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,719 serta pengaruh langsung Z terhadap Y sebesar 1,653.

**Metode Pendugaan Parameter (Estimasi)**

**Koefisien Jalur (Path Coefficient)**

Koefisien jalur (*path coefficient*) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1. Koefisien Jalur Langsung (*direct effect*)**

Variabel Eksogen	Variabel Endogen			
	Penyerapan Tenaga Kerja (Z)		PDRB Industri (Y)	
	Nilai Pengaruh	Arah	Nilai Pengaruh	Arah
Unit Usaha Industri (X1)	0,961	Positif	-1,367	Negatif
Upah Buruh (X2)	0,078	Positif	0,719	Positif
Penyerapan Tenaga Kerja (Z)	-	-	1,653	Positif

Sumber: diolah (output SPSS versi 20)

Berdasarkan perhitungan secara manual dengan perkalian 2 (dua) koefisien jalur (*path coefficient*) yang berada pada jalur hubungan tidak langsung, maka diperoleh koefisien jalur model penelitian secara tidak langsung (*indirect effect*) pada tabel berikut:

**Tabel 5.2. Koefisien Jalur Tidak Langsung (*indirect effect*)**

Variabel Eksogen	Variabel Perantara	Variabel Endogen	
		Nilai Pengaruh	Arah
Unit Usaha Industri (X1)	Penyerapan Tenaga Kerja (Z)	1,589	Positif
Upah Buruh (X2)		0,129	Positif

Sumber: diolah (output SPSS versi 20)

Berdasarkan perhitungan secara manual dengan penjumlahan antara koefisien jalur langsung (*direct Effect*) dan koefisien jalur tidak langsung (*indirect Effect*), maka diperoleh koefisien jalur pengaruh total (*total effect*) pada tabel berikut:

**Tabel 5.3. Koefisien Jalur Total (*total effect*)**

Variabel Eksogen	Variabel Endogen	
	Nilai Pengaruh	Arah
Unit Usaha Industri (X1)	0,222	Positif
Upah Buruh (X2)	0,848	Positif

Sumber: diolah (output SPSS versi 20)

#### *Signifikansi Parameter Individual (T-Statistik)*

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai *p-value* sebagai pengukur tingkat signifikansi secara langsung (*direct effect*) yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3. Signifikansi Pengaruh Langsung (*direct effect*)**

Variabel Eksogen	Variabel Endogen			
	Penyerapan Tenaga Kerja (Z)		PDRB Industri (Y)	
	P-value	Ket.	P-value	Ket.
Unit Usaha Industri (X1)	0,000	Signifikan	0,067	Tidak Signifikan
Upah Buruh (X2)	0,001	Signifikan	0,000	Signifikan
Penyerapan Tenaga Kerja (Z)	-	-	0,035	Signifikan

Sumber: diolah (output SPSS versi 20)

Berdasarkan penilaian dengan membandingkan 2 (dua) koefisien jalur (*path coefficient*) langsung dan tidak langsung, maka diperoleh tingkat signifikansi secara tidak langsung (*indirect effect*) yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4. Signifikansi Pengaruh Tidak Langsung (*indirect effect*)**

Variabel Eksogen	Variabel Perantara	Variabel Endogen	
		PDRB Industri (Y)	
		Koef. Jalur	Ket.
Unit Usaha Industri (X1)	Penyerapan Tenaga Kerja (Z)	-1,367 < 1,589	Signifikan
Upah Buruh (X2)		0,719 > 0,129	Tidak Signifikan

Sumber: diolah (output SPSS versi 20)

### Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model struktural dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun akurat. Evaluasi model struktural dapat diukur dari penilaian koefisien determinasi total ( $R^2$ -total) dengan rumus sebagai berikut (Noor, 2014, p. 149):

$$R^2\text{-total} = 1 - (\rho_{e1}^2) (\rho_{e2}^2)$$

Dimana perhitungan untuk nilai  $\rho_{e1}^2$  dan  $\rho_{e2}^2$  dengan rumus sebagai berikut:

$$\rho_{e1} = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$\rho_{e2} = \sqrt{1 - R_2^2}$$

Dengan demikian diperoleh penilaian evaluasi model struktural yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3. Evaluasi Model Struktural**

No.	Variabel	Nilai R-square	Nilai $\rho_e$	Nilai $R^2$ Total
1	Penyerapan Tenaga Kerja	0,994	0,077	-
2	PDRB Industri	0,947	0,230	-
<b>Model Struktural</b>				0,9997

Sumber: diolah (output SPSS versi 20)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5.3 di atas, nilai koefisien determinasi total ( $R^2$ -total) sebesar 0,9997 menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 99,97 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,03 persen dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

Tahap pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang diajukan pada model penelitian diterima atau ditolak melalui koefisien jalur dan pengujian parameter individual (Uji Statistik t).

**Tabel 5.4. Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Koefisien Jalur	Signifikansi		Ket.
		<i>p-value</i>	Ket.	
H1	0,961	0,000	Signifikan	<b>Diterima</b>
H2	0,078	0,001	Signifikan	<b>Diterima</b>
H3	1,653	0,035	Signifikan	<b>Diterima</b>
H4	<b>-1,367</b>	0,067	Tidak Signifikan	Ditolak
H5	0,719	0,000	Signifikan	<b>Diterima</b>
H6	1,589	> (-1,367)	Signifikan	<b>Diterima</b>
H7	0,129	< 0,719	Tidak Signifikan	Ditolak

*Sumber: diolah (output SPSS versi 20)*

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tujuan pembangunan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan, pengurangan kesenjangan dan pengentasan kemiskinan (Priyarsono, 2011, p. 5), akan coba dijabarkan dan mengaitkannya dengan hasil penelitian ini dalam bentuk pembahasan sebagai berikut:

#### Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Pertama, menganalisa pengaruh variabel unit usaha industri yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri, sehingga dapat diartikan dengan adanya penambahan unit usaha industri ini maka akan terjadi pula peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri, dikarenakan pada kondisi tersebut kebutuhan terhadap tenaga kerja menjadi meningkat dalam hal proses produksi, seiring dengan semakin bertambahnya unit usaha industri tersebut. Hasil temuan ini didukung dengan hasil temuan dari Nunung (2018); Muhtamil (2017); Zenda & Suparno (2017); Bustam (2016); dan Basuki & Arwanis (2015) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di daerah penelitian masing-masing.

Kedua, menganalisa pengaruh variabel upah buruh yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri. Kondisi ini dikarenakan pada kasus serapan tenaga kerja di sektor industri Kalimantan Selatan, faktanya menurut Poegoeh Prijambada sebagai Kabid Pembinaan dan Pengawasan Disnakertrans Kalsel, tidak semua unit usaha di Kalsel memberikan upah sesuai upah minimum dikarenakan banyaknya keberadaan perusahaan kecil seperti UMKM dan usaha keluarga (lihat Gambar 5.4) yang tenaga kerjanya merupakan keluarga atau orang terdekat atau bahkan hanya pemilik usaha tersebut (koranbanjar, 2019). Artinya pemilik usaha industri di Kalimantan Selatan yang mayoritas adalah usaha kecil menengah atau usaha keluarga (lihat Gambar 5.4) tidak terganggu dengan kebijakan pemerintah melalui kenaikan upah minimum dan lebih berfokus menyiasati kenaikan tersebut dengan melakukan kebijakan internal sehingga penambahan tenaga kerja tetap dapat dilakukan. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil temuan dari studi Dwirainaningsih (2018); Sulistiawati (2012); serta Dimas & Woyanti (2009) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian masing-masing.

#### Analisis Variabel Yang Mempengaruhi PDRB Sektor Industri

Pertama, menganalisa pengaruh variabel unit usaha industri yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB industri, dikarenakan pada kondisi tersebut jumlah unit usaha industri di Kalimantan Selatan lebih didominasi kelompok industri mikro kecil (IMK) yang penambahan total produksinya tidak sebanding dengan penambahan total produksi dari kelompok industri besar sedang (IBS) (lihat Gambar 5.2), dengan demikian pada kondisi tersebut tidak dapat meningkatkan PDRB Sektor Industri secara keseluruhan. Hasil temuan ini tidak sejalan dengan temuan

Raselawati (2011) yang menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha kecil menengah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha kecil menengah di Indonesia.

Meskipun demikian variabel unit usaha industri secara tidak langsung menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB industri jika melalui perantara penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan jumlah unit usaha industri di Kalimantan Selatan yang lebih didominasi kelompok industri mikro kecil (IMK) tersebut (lihat Gambar 5.4) sangat membutuhkan penambahan serapan tenaga kerja dengan tujuan peningkatan proses produksi agar penambahan total produksinya sebanding dengan penambahan total produksi dari kelompok industri besar sedang (IBS) (lihat Gambar 5.2), dengan demikian pada kondisi tersebut dapat meningkatkan PDRB Sektor Industri secara keseluruhan.

Kedua, menganalisa pengaruh variabel upah buruh yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan PDRB industri, dikarenakan pada kondisi tersebut kenaikan tingkat upah ini menjadikan produktivitas tenaga kerja meningkat, dan ini berdampak pada jumlah output yang diproduksi menjadi meningkat pula. Di sisi lain, secara tidak langsung jika melalui perantara penyerapan tenaga kerja, variabel upah buruh tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB industri. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya keberadaan usaha kecil menengah dan sejenisnya (lihat Gambar 5.4) menyebabkan tidak semua pemilik usaha di Provinsi Kalimantan Selatan memberikan upah sesuai upah minimum dikarenakan tenaga kerja merupakan keluarga atau orang terdekat atau bahkan hanya pemilik usaha tersebut sebagaimana yang diungkapkan Poegoeh Prijambada sebagai Kabid Pembinaan dan Pengawasan Disnakertrans Kalsel (koranbanjar, 2019), sehingga tidak terlalu bergantung pada serapan tenaga kerja dalam proses produksi.

Arah koefisien jalur secara langsung yang menunjukkan pengaruh positif di atas sejalan dengan teori yang diungkapkan Nurtiyas (2016, p. 169) bahwa dalam teori upah efisiensi, disebutkan bahwa dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya.

Ketiga, menganalisa pengaruh variabel penyerapan tenaga kerja yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perkembangan PDRB industri. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya serapan tenaga kerja maka tingkat produktivitas dalam industri pengolahan menjadi tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan produksi total dalam hal ini pada sektor industri. Hasil temuan ini sesuai dengan studi dari Maharani (2016) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan PDRB di Sumatera Utara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan pertama adalah unit usaha industri berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua adalah upah buruh berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga adalah penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Keempat adalah unit usaha industri secara langsung tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Kelima adalah upah buruh secara langsung berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Keenam adalah unit usaha industri secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyerapan tenaga kerja. Ketujuh adalah upah buruh secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyerapan tenaga kerja. Kedelapan adalah secara total variabel upah buruh lebih besar pengaruhnya terhadap PDRB Industri daripada variabel unit usaha industri.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan adalah pertama dengan temuan variabel Unit Usaha Industri berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, maka diharapkan pemerintah daerah perlu memberikan suatu kebijakan untuk menambah jumlah perusahaan industri, seperti memberikan kemudahan dalam berinvestasi sehingga pengembangan usaha bisa terus dilakukan termasuk kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan usaha baru. Dengan demikian serapan tenaga kerja bisa meningkat, guna menekan salah satu masalah sosial yaitu pengangguran.

Kedua adalah hasil temuan variabel Unit Usaha Industri berpengaruh negatif terhadap PDRB Sektor Industri dan tidak signifikan. Meskipun demikian pemerintah daerah tetap perlu memberikan kebijakan untuk peningkatan jumlah industri mikro kecil (IMK) misalnya dengan kemudahan administrasi dalam pembedaan usaha baru atau memberikan stimulus berupa kredit usaha serta dukungan memasarkan produk baik di dalam maupun di luar negeri, agar total produksi industri mikro kecil (IMK) dapat sebanding dengan

industri besar sedang (IBS), dengan demikian secara keseluruhan jumlah unit usaha dapat signifikan meningkatkan PDRB Sektor Industri.

Ketiga adalah hasil temuan variabel Upah Buruh yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dengan arah positif, diharapkan pemerintah daerah perlu membuat kebijakan khusus mengenai pengupahan misalnya dengan tetap mengacu pada standar kebutuhan para tenaga kerja, di sisi lain memperhatikan masukan dari kelompok pengusaha karena tidak semua upah yang diberikan pemilik usaha berada di bawah upah minimum.

Keempat adalah hasil temuan variabel Upah Buruh yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sektor Industri, maka pemerintah daerah diharapkan dalam hal ini perlu menjaga tingkat upah pada standar kebutuhan para tenaga kerja, dengan tujuan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar secara keseluruhan total output yang diproduksi menjadi meningkat pula.

Kelima adalah dengan temuan variabel Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sektor Industri, maka diharapkan pemerintah daerah perlu rutin melaksanakan pameran pasar kerja sebagai bentuk upaya meningkatkan serapan tenaga kerja, selain itu dukungan pelatihan keterampilan calon tenaga kerja juga diperlukan sebagai bekal untuk peningkatan produktivitas pada saat bekerja. Dengan demikian kedua program tersebut harapannya dapat berdampak pada peningkatan total output yang diproduksi khususnya pada sektor industri.

Keenam adalah dengan temuan secara total variabel upah buruh yang lebih besar pengaruhnya terhadap PDRB Industri, maka diharapkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan aturan-aturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengupahan untuk menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja, agar total produksi sektor industri dapat ditingkatkan.

Ketujuh adalah penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan karena terbatasnya waktu, tenaga dan biaya, oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan dengan menambahkan beberapa faktor lainnya yang berkaitan dengan perkembangan indikator-indikator sektor industri serta faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk bruto sektor industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Aryanti, H. G., Setiadi, I. O., Hastyorini, I. R., & Sari, K. (2015). *Ketenagakerjaan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Atmanti, H. D., & Basuki, M. U. (2011). Penentuan Upah Minimum.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Banjar, K. (2019, Oktober 30). *Tidak Semua Perusahaan Di Kalsel Beri Upah Sesuai UMP*. Retrieved Mei 29, 2020, from koranbanjar.net: <https://koranbanjar.net/tidak-semua-perusahaan-di-kalsel-beri-upah-sesuai-ump/>
- Basuki, A. T., & Arwanis, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2014. *Buletin Ekonomi*, 139-270195.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boediono. (2011). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Bustam, N. H. (2016). Pengaruh Jumlah Unit, PDB Dan Investasi UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* .
- Dimas, & Woyanti, N. (2009). Penyerapan Tenaga Kerja Di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 32-41.
- Dwirainaningsih, Y. (2018). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekalongan.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Seri Pustaka Kunci.
- Hapsari, P. P., Hakim, A., & Soeaidy, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). *Wacana*.
- Maharani, D. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara. *Intiqad*, 32-46.
- Mangilaleng, E. J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Matz, & Usry. (2003). *Cost Accounting Planning and Control*. Jakarta: Erlangga.
- Muhtamil. (2017). Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*.

- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan D Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1-8.
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Nunung, N. R. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri. *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*.
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 166-175.
- Pramusinto, N. D., Daerobi, A., & Mulyaningsih, T. (2019). Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Pengangguran Di Indonesia. *Seminar Bisnis Magister Manajemen*.
- Priyarsono, D. S. (2011). *Dari Pertanian Ke Industri (Analisis Pembangunan Dalam Perspektif Regional)*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Rahman, A. J., Soelistyo, A., & Hadi, S. (2016). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Propinsi Banten Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 113-121.
- Raselawati, A. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rochmani, T. S., Purwaningsih, Y., & Suryantoro, A. (2016). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah. *JIEP*.
- Sholeh, M. (2007). Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.
- Simanjuntak, P. (2011). *Pengantar Ekonomi Sumberdaya*. Jakarta: FEUI.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2009). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS*, 195-211.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Public Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunyoto, D. (2012). *Metode Analisis Jalur Untuk Riset Ekonomi*. Bandung: Yrama Widya.
- Utami, R. H. (2013). Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Di Kawasan Kedungsepur (Kendal Demak Ungaran Semarang Gerobongan Salatiga). *Skripsi. Universitas Negeri Semarang*.
- Zenda, R. H., & Suparno. (2017). Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.